

ISLAM DAN DEMOKRASI: Kajian Fikih Siyasah Tentang Tantangan Dan Hambatan Demokratisasi Di Dunia Islam

Ali Mutakin¹

Abstrak

Di dunia Islam, demokrasi merupakan system politik yang masih diperdebatkan oleh ulama, akademisi serta inetelektual Muslim. Bagi yang menerima system demokrasi dalam system pemerintahan, mereka menganggap bahwa demokrasi kompatibel dengan Islam. Setidaknya ada dua alasan yang dijadikan dasar, yaitu pertama ajaran Islam tentang nilai-nilai yang menjadi acuan kehidupan: 1) al-Musāwah, 2) al-Hurriyah, 3) al-Ukhuwwah, 4) al-‘Adālah, 5) al-Shūra, 6) al-Mas’uliyāt. Kedua, ajaran Islam tentang hak-hak yang harus diusahakan pemenuhannya oleh diri sendiri, maupun masyarakat atau Negara, yang meliputi: 1) hifz al-dīn (hak beragama), 2) hifz al-nafs (hak Hidup), hifz al-Maal (hak milik individu/porpeti righ), 5) hifz al-‘irdh hak mempertahankan nama baik.

Kata Kunci: Islam, Demokrasi, dunia Islam

PENDAHULUAN

Salah satu sistem politik Islam yang sampai saat ini masih sering diperbincangkan di Negara-negara Islam adalah term demokrasi. Meskipun sebenarnya term demokrasi sudah diterima oleh hampir semua pemerintahan di dunia; bahkan corak pemerintahan otoriter sekalipun menggunakan atribut “demokrasi”, guna memberi ciri kepada rezim dan aspirasi mereka. Hal ini pada akhirnya menimbulkan berbagai macam istilah demokrasi itu sendiri, seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin. Demokrasi kerakyatan, demokrasi sosialis dan lain sebagainya. Pengistilahan tersebut sebagian dimaksudkan untuk

¹ Ali Mutakin lahir di Blora 10 Juli 1982. Lulus S1 dari STAI Nurul Iman Parung Bogor dan S2 dari UIN Jakarta. Sekarang sedang menempuh program doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di STAI Nurul Iman Parung Bogor.

membawa konsep demokrasi lebih dekat kepada kultur masyarakat tertentu dan sebagian lagi dimaksudkan untuk menjusifikasi system politik yang diajukan oleh pemerintah tertentu. Tentu saja, tetap ada konsep dasar tentang demokrasi serta kondisi-kondisi minimal yang harus terpenuhi oleh sebuah system yang demokratis.²

Mendiskusikan hubungan Islam dan demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis. Hal ini dikarenakan, Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak dan mu'amalat manusia. Sedangkan demokrasi hanyalah sebuah system pemerintahan dan mekanisme kerja antar anggota masyarakat serta symbol yang diyakini membawa banyak nilai positif.³ Polemic hubungan Islam dan demokrasi ini sebenarnya dipicu dari sebuah ketegangan teologis. Dimana antara rasa keharusan memahami doktrin yang telah lama mapan oleh sejarah-sejarah dinasti Muslim dengan tuntutan untuk memberikan pemahaman baru pada doktrin tersebut sebagai respon atas fenomena social yang telah berubah.⁴

Sesungguhnya, demokrasi merupakan tantangan dan obek perdebatan, bukan hanya dunia Islam dan Barat, akan tetapi lebih di dunia interal Islam sendiri. Menurut Esposito, setidaknya ada tiga kelompok yang saling berhadapan terkait dengan wacana demokrasi ini, yakni kelompok secular, rejeksionis dan kelompok pembaharu. Kelompok sekuler menuntut pemisahan agama dan persoalan Negara, kelompok rejeksionis (baik moderat ataupun puritan) menyatakan bahwa bentuk pemerintahan Islam tidak sesuai dengan dengan system demokrasi, sementara kelompok pembaharu mencoba merekonsiliasikan Islam dan demokrasi dengan melakukan

² Masykuri Abdilah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna* alih bahasa Wahib Wahab (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2004) h. 2-3

³ Disamping nilai positif, demokrasi juga memiliki nilai negatifnya. Nilai negative dari demokrari di Indonesia misalnya pada pemilihan umum, pilkada, pileg dan lain-lain, selain biaya yang dikeluarkan oleh Negara sangat mahal, juga sering menimbulkan penyakit social dengan maraknya money politik (pembelian hak suara), di samping adanya konflik antar masyarakat disebabkan beda pilihan sehingga timbullah konflik dan disintegrasi dalam masyarakat. Begitu juga problem-problem yang muncul dalam menjalankan demokrasi seperti di Britania (Irlandia Utara), Prancis (Corsica), atau Spanyol (Provinsi Basc), yang menunjukkan bahwa masing-masing masyarakat, paling tidak sebagian icirikan dengan adanya struktur konflik yang antagonistic. Lihat Rene Klaff, *Prinsip-Prinsip Dasar Demorasi dan Pemerintahan Yang Baik dalam Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002) h. 22

⁴

reinterpretasi terhadap konsep-konsep kunci dalam tradisi Islam, seperti *shūrā* (lembaga konsultasi antara rakyat dan pemerintah), *ijmā'* (consensus masyarakat), *ijtihad* (reinterpretasi) dan *maṣlaḥah* (kesejahteraan publik)⁵

Konsep *shūrā* misalnya, merupakan konsep yang terbuka untuk dipikirkan dan dikembangkan kearah konsep demokrasi dalam pengertian sekarang ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim kontemporer.⁶ Menurut Abou El-Fadl perintah dalam Al-Qur'an merupakan bentuk penandasan tentang bentuk tidak dibenarkannya penindasan, dan kewenangan oleh elit dispotik. Keputusan – berdasarkan konsep ini- merupakan interaksi demokratis di antara banyak orang.⁷

Sistem demokrasi sebenarnya berkembang pesat setelah Perang Dunia II yang dimenangkan oleh Amirika Serikat dan sekutunya. Amerika dan sekutu-sekutunya sebagian besar menggunakan system demokrasi, sehingga banyak negara-negara yang memilih system demokrasi. Setiap negara yang merdeka menginginkan stabilitas politiknya aman, sehingga stabilitas tersebut tergantung bagaimana pemerintahan menjalankan tugasnya yang mendapat dukungan dan tuntutan dari rakyatnya. Dengan demikian, salah satu indicator untuk mengetahui demokrasi atau tidaknya suatu Negara adalah setelah mengetahui sejumlah hal penting dalam kaitannya dengan pemerintahan antara lain adakah menejemen pemerintahan didasarkan atas prinsip pembagian atau pemisahan trias politika, adakah proses pengambilan keputusan didasarkan patas prinsip *butom up*, adakah diberlakukan desentralisasi pemerintahan adan atau dekonsentrasi kekuasaan dan lain-lain.

Makalah ini akan mencoba menguraikan demokrasi dalam pandangan Islam, berikut hambatan dan tantangan pelaksanaan demokrasi di Negara-negara muslim.

⁵ Lihat John. Elposito, *a respon to the place of tolerance in Islam* (Originality Published in the Februari/Maret 2002 issues of Boston Review)

⁶ Al-Jabiri, *Syuro; Tradisi, Partikularitas dan Universalitas* (Yogyakarta: LkiS, 2003) h. xii

⁷ Abou El-Fadl, *Islam and The Calling of demokrasi* (Princethon: Princethon University Press, 2004) h. 230

PEMBAHASAN

A. Demokrasi Dalam Pandangan Islam

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *Demos* (rakyat) dan *Kratos* (kekuasaan). Secara leteral bisa diartikan bahwa demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat.⁸ Pengertian demokrasi secara tepat dapat dilihat dari berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli sebagaimana yang dinukil oleh Masykuri Abdillah dalam buku *Demokrasi Di Persimpangan Makna*. Menurut Joseph A. Schumpeter demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting –atau arah kebijakan di balik keputusan ini- secara langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sementara Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl mendefinisikan demokrasi adalah suatu system pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah public oleh warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama, dengan para wakil mereka yang telah terpilih.⁹ Sedangkan Abdul Ghani Al-Rahhal dalam bukunya *Al-Islāmiyyūn Sarab Al-Dimuqraṭiyyah* menyatakan bahwa demokrasi sebagai kekuasaan rakyat oleh rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan.¹⁰

Dari uraian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, atau oleh wakil rakyat yang terpilih dalam sistem pemilu yang bebas.

Jika diperhatikan, demokrasi yang diartikan sebagai “pemerintahan oleh rakyat” dalam arti yang sesungguhnya tidak pernah ada dan sepertinya tidak akan pernah ada. Hal ini merupakan suatu yang

⁸ Masykuri Abdilah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna...*h. 71. Lihat juga Ahmad Vaezi, *Agama Politik Nalar Politik Islam* alih bahasa Ali Syahab (Jakarta: Citra, 2006) h. 193

⁹ Masykuri Abdilah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna...* 72-73

¹⁰ Abū Nashr Muhammad, *Menggugat Demokrasi dan Pemilu* alih bahasa Abu Muqbil Ahmad Yuswaji dan Abu Nizar Arif Mufid (Depok: Darul Hadits, 2004) h. 33

meustahil bagi setiap rezim demokratis untuk benar-benar demokratis, karena akan terganjal oleh kriteria yang berasal dari arti kata itu sendiri. Moral yang tinggi dan keuntungan-keuntungan yang disebutkan guna menjustifikasi pemerintahan demokratis tidak diragukan memerlukan “demokrasi dengan partisipasi” yang mendelegasikan keputusan-keputusan kepada warga penduduk. Jadi dalam suatu pertemuan atau selama pemilihan rakyat dapat mengekspresikan opini-opini mereka. Oleh karena itulah dalam konsep demokrasi modern “rakyat” (*demos*) digantikan dengan “perwakilan” (*representativ*), sehingga hanya sebagian kecil dari penduduk yang akan bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan-kepentingan rakyat. Jadi, demokrasi modern merupakan pemerintahan oleh perwakilan yang dipilih oleh mayoritas rakyat.¹¹

Dalam praktiknya demokrasi perwakilan (*representative democracy*) adalah norma yang paling umum diantara system demokrasi modern/kontemporer. Adapun karakteristik utama menurut Dahl adalah sebagai berikut:

1. Pejabat yang terpilih
Pengawasan atas keputusan-keputusan pemerintah berkaitan dengan kebijakan secara konstitusional dikukuhkan dalam pemilihan pejabat-pejabat oleh rakyat. Jadi pemerintahan demokratis yang modern berskala besar adalah merupakan perwakilan.
2. Bebas, jujur dan pemilihan berulang-ulang
Pejabat-pejabat yang terpilih ditentukan dalam pemilihan yang dilakukan secara jujur dan berulang-ulang, dimana cara pemaksaan secara relative jarang terjadi.
3. Kebebasan untuk berekspresi
Rakyat mempunyai hak untuk mengekspresikan dirinya dalam masalah-masalah politik tanpa ada bahaya ancaman hukuman; ini termasuk kritikan-kritikan pada pejabat-pejabat, rezim, peraturan-peraturan social-ekonomi dan ideology yang sedang berkuasa.
4. Akses kepada sumber-sumber informasi alternative
Rakyat berhak mencari sumber informasi yang alternative dan independen dari warga-warga lain, pakar-pakar, Koran-koran, majalah-majalah, buku-buku, dan lain sebagainya.
5. Otonomi Asosiasi

¹¹ Ahmad Vaezi, *Agama Politik Nalar Politik Islam...196-197*

Rakyat berhak untuk membentuk asosiasi-asosiasi atau organisasi-organisasi yang relative independen, termasuk partai-partai politik independen dan kelompok-kelompok kepentingan untuk mencapai hak-hak mereka yang beragam.

6. Kewarganegaraan yang inklusif

Tidak ada seorang dewasa pun yang tinggal permanen di negeri yang tunduk pada hukum Negara tersebut, dapat dicekal hak-haknya dalam kaitannya dengan kelima institusi-institusi politik tersebut diatas.¹²

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sebuah system politik yang mengakui hak rakyat untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan politik, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang melalui wakil-wakil mereka terpilih, guna mendistribusikan dan mengatur kekuasaan politik di bawah pengawasan mayoritas. Sedangkan sikap bebas, jujur dan pemilihan berulang-ulang, bebas berekspresi, kewarga-negaraan yang inklusif dan seterusnya adalah dibutuhkan untuk menjamin sehatnya proses demokrasi tersebut.

Dalam konteks Negara-negara Muslim, demokrasi menjadi salah satu term yang sering didiskusikan. Hal ini dikarenakan masalah kesesuaian antara Islam dan demokrasi, terutama karena demokrasi didasarkan pada sekularisme, sedangkan Islam adalah agama yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan. Menurut John L. Esposito yang dikutip Masykuri bahwa baik prinsip demokrasi dan proses demokratisasi merupakan pokok perdebatan yang hangat di kalangan umat Islam. Di samping, nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi secara inheren merupakan antithesis, sebagaimana terlihat pada masalah-masalah seperti perbedaan antara laki-laki dan perempuan.¹³

Menurut Huntington, terdapat kesesuaian antara Islam dan demokrasi, karena Islam menempatkan egalitarianisme dan voluntarisme sebagai tema pokoknya. Begitu juga Ernest Gellner mengatakan bahwa bentuk *high culture* Islam yang diikuti dengan sejumlah keistimewaan (unitarianisme, aturan etik, individualism, skriptualisme, puritanisme, egalitarian yang menolak meditasi dan hierarki, mistisisme) semuanya sebangun dan serupa dengan tuntutan modernitas atau modernisasi, yang pada umumnya itu semua juga selaras dengan tuntutan demokrasi.

¹² Ahmad Vaezi, *Agama Politik Nalar Politik Islam...* 198-199

¹³ Masykuri Abdilah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna...* 5

Meskipun demikian, sesuai apapun antar Islam dan demokrasi dalam teori, namun belum tentu sesuai dalam praktik.¹⁴

Dalam merespon istilah dan konsep demokrasi, di kalangan ulama, intelektual dan aktivis Muslim terdapat kecenderungan yang berbeda. Secara garis besar wacana Islam dan demokrasi terdapat tiga pemikiran yaitu:¹⁵

1. Islam dan demokrasi adalah dua system yang berbeda

Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok Islamis atau Islam ideologis, yang memandang Islam sebagai system alternative demokratis, sehingga sebagaimana konsep barat tidak tepat dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Logika yang dipakai mereka adalah pemerintahan demokrasi berasal dari barat sedangkan barat bukanlah Islam sehingga barat adalah kafir. Segala sesuatu yang kafir tentunya berdosa sehingga bagi Muslim sejati akan berdosa jika mengikutinya. Walhasil, system demokrasi merupakan system kafir karena telah meletakkan kedaulatan Negara ditangan rakyat bukan Tuhan. Diantara tokoh kelompok ini adalah Taqīy al-Dīn al-Nabhānī dengan partainya Hizbut Tahrir. Kelompok ini sangat menentang ide-ide demokrasi dan berpendapat bahwa sebagian besar dari aktifitas demokrasi tertolak secara syar'i. Mereka memandang bahwa prinsip pemilu secara nyata melanggar asas *wakalah*, yaitu menurut pandangan Hizbut Tahrir dianggap batil.

2. Islam berbeda dengan demokrasi

Kelompok ini menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam Islam tetapi tetap mengakui adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi, apabila demokrasi didefinisikan secara procedural seperti yang dipahami dan dipraktikan di Negara-negara barat. Sebaliknya jika demokrasi dimaknai secara substantif, yaitu kedaulatan di tangan rakyat Islam merupakan system politik yang demoratis. Setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri, ternyata demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam. Diantar tokoh kelompok ini adalah Abū al-A'la al-Maudūdi, ia menyatakan bahwa demokrasi sekuler barat pemerintahan dibentuk dan

¹⁴ Masykuri Abdilah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna...* 7

¹⁵

diubah dengan pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi dalam Islam juga memiliki wawasan yang mirip, akan tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa jika dalam sistem barat suatu Negara demokratis menikmati hak kedaulatan mutlak. Sedangkan dalam demokrasi Islam kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang digariskan hukum ilahi.

3. Islam membenarkan dan mendukung demokrasi

Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok moderat atau liberal. Menurut kelompok ini, Islam merupakan system nilai yang membenarkan demokrasi seperti yang sekarang dipraktikan di Negara-negara maju. Penerimaan ini disebabkan apa yang dianggap prinsip-prinsip demokrasi sesungguhnya juga terkandung dalam ajaran Islam seperti keadilan, persamaan, musyawarah dan lain sebagainya.

Apabila diperhatikan, demokrasi sebagai sebuah gagasan yang mendasarkan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan public, maka secara mendasar sejalan dengan Islam. Setidaknya ada dua alasan yang menjadi landasan akan hal tersebut.¹⁶

Pertama, ajaran Islam tentang nilai-nilai yang menjadi acuan kehidupan: 1) *al-Musāwah*, Islam memandang bahwa semua manusia sama dalam martabat dan kedudukannya, tidak ada perbedaan dihadapan Allah Swt. kecuali dalam hal ketaqwaannya. 2) *al-Hurriyah*, kemerdekaan atau kebebasan berdasarkan pertanggungjawaban moral dan hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini didasari oleh konsep menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang memandang bahwa manusia adalah makhluk terhormat yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempunyai kebebasan memilih. 3) *al-Ukhuwwah*, persaudaraan sesama manusia sebagai satu species yang diciptakan dari bahan baku yang sama. 4) *al-‘Adālah*, keadilan yang berintikan kepada pemenuhan hak-hak manusia baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. 5) *al-Shūrah*, musyawarah dimana setiap warga Negara berhak atas partisipasi dalam urusan public yang menyangkut kepentingan bersama. 6) *al-Mas’uliyāt*, prinsip pertanggungjawaban yang dipikul oleh setiap pemegang kekuasaan. Padadarnya kekuasaan

¹⁶ Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) h. 41

merupakan sesuatu yang mesti diwaspadai bukan nikmat yang harus disyukuri.¹⁷

Kedua, ajaran Islam tentang hak-hak yang harus diusahakan pemenuhannya oleh diri sendiri, maupun masyarakat atau Negara, yang meliputi: 1) *hifz al-din* (hak beragama), 2) *hifz al-nafs* (hak Hidup), *hifz al-Maal* (hak milik individu/ perorangan), 5) *hifz al-'irdh* hak mempertahankan nama baik.¹⁸

B. Demokrasi di Negara Islam

Jika dilihat dari teori demokrasi, dunia Muslim memang cukup membingungkan. Hal ini dapat dilihat pada saat seluruh dunia tampaknya mengalami demokratisasi secara cepat malah sebagian besar Negara-negara muslim masih bertahan otokratik, bahkan despotik atau bahkan berjalan kearah yang lain. Menurut para teoritis transisi demokrasi baru belakangan ini mulai memperhatikan keunikan dunia Muslim. Semula sikap mereka tampak sederhana dalam menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi. Sebenarnya dunia Islam harus menjadi garda depan bagi demokratisasi karena ia merupakan wilayah baru yang menantang teori demokrasi guna dapat mengeksplorasi fenomena-fenomena yang terjadi.¹⁹

Menurut Azra, fenomena yang terjadi di Mesir, yakni penggulingan Presiden Mesir oleh militer pada Kamis dini hari, 4 Juli 2013 meningkatkan ketidakpastian transisi demokrasi di Dunia Arab. Ia hanya menduduki jabatan presiden tidak lebih dari satu tahun, kemudian sudah dihadapkan pada gelombang protes yang terus membesar karena nepotisme kekuasaan pada al-Ikhwan al-Muslimun (IM). Di samping ia dipandang tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia mampu mengatasi krisis ekonomi Mesir yang terus berlanjut.²⁰

Senada dengan pernyataan Azra, survei Freedom House 2003 menyatakan bahwa tingkat kebebasan politik di Negara-negara mayoritas Muslim khususnya Timur Tengah paling memprihatinkan.

¹⁷ A. Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010) h. 50

¹⁸ A. Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010) h. 51

¹⁹ Abdelwahab El-Effendi "Defisit Demokrasi di Dunia Islam" dalam Bernard Lewis *Islam Liberalisme Demokrasi* alih bahasa Mun'im A. Sirry (Jakarta: Paramadina, 2002)h. 219

²⁰ Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam; Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) h. 261

Kesenjangan kebebasan paling besar terjadi di Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, khususnya di dunia Arab.²¹

Ketiakpastian demokrasi di Timur Tengah menemukan momentum pada Januari 2011, di Tunisia, Mesir, Lybia, Yaman, Bahrain dan Syria. Negara-negara tersebut, rezim-rezim otoriter telah ditumbangkan dan diganti dengan pemerintahan baru hasil pemilu, tetapi seperti dilihat dalam perkembangan Mesir, harapan bagi terwujudnya system dan politik demokratis masih jauh dari jangkauan. Ditambah dengan Nepotisme partai politik yang berkombinasi dengan kegagalan mengatasi masalah ekonomi dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat, merupakan pil pahit bagi harapan besar masyarakat Mesir sendiri agar demokrasi dapat menyelesaikan berbagai masalah secara cepat. Justeru ekspektasi besar yang terlihat sulit terwujud mendorong kian menguatnya oposisi yang beujung pada kudeta militer.²²

Sementara perkembangan demokrasi di Syria juga tidak menentu. Bermula dari gelombang peningkatan aspirasi masyarakat untuk *democracy opening* berikutnya dengan gelombang “*Arab Spring*” di Tunisia dan Mesir, Syria tenggelam ke dalam perang saudara di antara kekuatan militer Presiden Bashar Assad melawan barisan oposisi yang mendapat dukungan Negara-negara barat dan Arab Saudi dan Qatar. Perang saudara berlanjut menjadi perang sektarianisme, ketika rezim Bashar Assad yang Syiah didukung pasukan Hizbullah yang berpusat di Libanon dan juga Iran berhadapan dengan lascar Sunni yang didukung Arab dan Qatar. Bahkan kemudian adanya anasir al-Qaeda ikut bertempur atas nama Sunni yang pada akhirnya memunculkan *Islamic State of Irak and Syria* (ISIS) sejak tahun 2013. Dengan demikian, kondisi Negara-negara tersebut kacau balau yang semula factor politik yang mudah diselesaikan, merembet persoalan sektarianisme keagamaan yang sulit bahkan tingkat kebrutalannya sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan norma kemanusiaan yang adil dan beradab.²³

Perang sektarianisme keagamaan juga terjadi di Yaman pada Maret 2015 antara Koalisi Arab Saudi (beserta 9 negara Arab lain) melawan pemberontak Houthi yang Syiah melawan pemerintahan

²¹ Lihat Asrori S. Karni, *Hajatan Demokrasi: Potret Jurnalistik Pemilu Langsung Simpul Islam Indonesia Dari Moderat Hingga Garis Keras* (Jakarta: Era Media Informasi) h. 2

²² Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam...*261

²³ Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam...*262

Yaman. Telah terjadi ribuan korban jiwa, yang sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda perang dapat diakhiri.²⁴

Sementara di Turki, perkembangan politik juga mencemaskan, setelah memenangkan tiga kali pemilu, PM Tayyip Recep Erdogan dengan AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) telah menempatkannya sebagai perdana menteri, dan pemilu langsung sebagai presiden, kekuasaan Erdogan tidak tertandingi disisi lain juga menghadapi tantangan kian meluas. Meski Erdogan mampu memadamkan gelombang besar protes di Taskim Square, Istanbul, Ankara dan beberapa kota lain sepanjang 2013, dan kemenangan dalam pemilu legislative November 2015, tentu membuat oposisi terhadap kekuasaan terus berlanjut. Hal demikian juga sangat mungkin kaum oposisi dapat menemukan momentum dengan memanfaatkan factor pemicu tertentu.²⁵ Demikian merupakan salah satu penyebab utama memudarnya demokrasi Turki.

Dengan kekuasaan yang nyaris mutlak, Erdogan dalam lima tahun terakhir semakin sering melakukan tindakan sewenang-wenang. Secara represif, ia mengorbankan hak demokrasi warga dan sekaligus HAM. Perkembangan ini sekali lagi membenarkan argumen Lord Acton: '*Power tends to corrupt; absolute power corrupt absolutely*'. Kenyataan ini terlihat dari langkah yang dilakukan Presiden Erdogan. Ia tidak hanya memberlakukan keadaan darurat, tetapi juga melakukan "pembersihan" besar-besaran terhadap mereka yang 'tercurigai' sebagai yang terkait dengan kudeta dan organisasi Hizmet atau Gulen, yang dianggap Erdogan, bertanggungjawab sebagai otak (*master-mind*) upaya kudeta. Hal ini Nampak pada angka-angka (sampai 22 Juli) yang bisa dipastikan terus bertambah ini: 21.738 guru dan dosen Kementerian Pendidikan diberhentikan, 21 ribu izin lembaga pendidikan swasta dari pendidikan dasar sampai universitas dicabut, 8.777 pegawai Kementerian Dalam Negeri dipecat, 6.319 personel militer ditahan, 1.577 ketua jurusan di universitas dipaksa mengundurkan diri, dan 1.481 jaksa dan hakim juga ditahan.²⁶

C. Tantangan Dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Demokrasi

²⁴ Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam...*262

²⁵ Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam...*262

²⁶ <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/16/07/27/oazb0v319-turki-indonesia-dan-demokrasi-2>

Menurut Sandra Halperin munculnya gelombang demokrasi berkaitan erat dengan enam hal berikut, yaitu (1) runtuhnya struktur kelas tradisional; (2) meningkatnya kekuatan relatif kelas pekerja terhadap kelas – kelas lain; (3) berkembangnya sistem kapitalisme bersamaan dengan kekuatan nasional; (4) peningkatan daya beli warga negara domestik dan (5) adanya perluasan dan integrasi dalam pasar domestik serta (6) demokrasi berkaitan erat dengan adanya reformasi terhadap redistributif yang mempromosikan pengembangan pasar domestik yang berbasis ekspansi ekonomi.²⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketiadaan hal tersebut merupakan hambatan munculnya demokrasi di suatu Negara. *Pertama*, demokratisasi ditandai dengan runtuhnya struktur kelas tradisional, namun apa yang terjadi di Timur Tengah justru sebaliknya. Keadaan struktur sosial di kawasan Timur Tengah masih bertahan meskipun telah banyak terjadi gerakan – gerakan kemerdekaan, kudeta dan pemberontakan²⁸ Pembangunan sistem negara di Timur Tengah kontemporer pada dasarnya hanya mengubah struktur politik daerah tersebut, namun struktur sosial yang berkembang selama Kekaisaran Ottoman masih bertahan hingga pada saat sistem negara modern terbentuk. Keadaan ini tercermin dari kuatnya *power* tuan tanah dalam mengatur struktur sosial masyarakat Timur Tengah untuk mendapatkan keuntungan dengan menguasai pembudidayaan lahan. Hal ini terlihat dengan berbagai kebijakan yang diambil diarahkan untuk mempertahankan struktur sosial dan politik tradisional. Misalnya saja dengan menghapus eksistensi kelompok asing dan minoritas yang melakukan fungsi borjuis kewirausahaan dalam perdagangan, keuangan, industri dan sebagian profesi lainnya dan lebih jauh diikuti dengan subordinasi industri dan wirausaha pribumi. Terbukti selama tahun 1950an kelompok produsen di Mesir, Suriah, Irak, Libanon dan Yordania sulit untuk memperluas basis ekonomi mereka karena terhalang oleh birokrasi yang dicaptakan oleh para elit penguasa.²⁹

Kedua, peran kelas pekerja justru ditanggapi negatif oleh anggota politik otoriter yang berorientasi nasionalis dan tradisional

²⁷ Halperin, Sandra, *The Post-Cold War Political Topography of the Middle East: Prospects for Democracy* (tk: Third World Quarterly, 2005) h. 1151.

²⁸ Halperin, Sandra, *The Post-Cold War Political Topography of the Middle East...*1139

²⁹ Halperin, Sandra, *The Post-Cold War Political Topography of the Middle East...*1137-1138

yang mengembangkan politik tradisional berbasis agama dan anti imperialis. Terjadi penekanan terhadap kelompok aliran kiri yang menyuarakan reformasi kepemilikan lahan dan demokrasi politik serta pengembangan program industrialisasi dan penerapan pajak progresif. Dapat dikatakan bahwa pergerakan kelas pekerja dalam organisasi buruh sangatlah terbatas dan diawasi secara ketat oleh pemerintah.³⁰ *Ketiga*, sistem kapitalisme yang dicirikan dengan perkembangan industrialisasi dan pasar bebas tidak dapat berkembang di kawasan Timur Tengah. Roda perekonomian nasional sebagian besar dikuasai oleh para tuan tanah dan saudagar sehingga tidak ada kelas ekonomi yang muncul dan menyaingi kekuatan mereka. Contohnya saja di Mesir, perekonomian di perkotaan dipimpin oleh kelas tradisional, sedangkan di Suriah kekuatan ekonomi masih dipegang oleh para pemegang lahan dan saudagar yang memerintah dengan model aristokrasi layaknya pada masa Kerajaan Ottoman. Sedangkan di negara – negara Jazirah Arab seperti UAE, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi dan Oman menerapkan elit manajerial yang berjalan di bawah pengaturan sultan atau *emir* atau raja. Meskipun pada tahun 1950an muncul personil birokrasi dan militer yang mulai mengambil alih jalannya pemerintahan namun elit – elit tersebut secara substansial memiliki kewenangan yang sama dengan elit pemerintahan militer dan Ottoman kecil yaitu hanya untuk mengatur birokrasi di ranah lokal namun tidak memiliki kekuatan untuk mengatur birokrasi di ranah sentral.³¹

Negara – negara Arab juga menampilkan struktur ekonomi ganda dalam sistem perekonomiannya. Hal ini ditandai dengan kecilnya peran penduduk lokal dalam roda perekonomian nasional, rendahnya kuantitas barang ekspor dan sedikitnya mitra dagang negara – negara Arab serta adanya ketimpangan ekonomi yang sangat terlihat antara elit politik dan masyarakat di daerah terpencil yang dapat diketahui dengan indikator – indikator berikut, yaitu struktur kepemilikan lahan yang tidak merata, ketimpangan distribusi pendapatan dan pola konsumsi elit yang sangat kontras dengan pola konsumsi masyarakat³².

³⁰ Halperin, Sandra, *The Post-Cold War Political Topography of the Middle East...*1142-1143

³¹ Halperin, Sandra, *The Post-Cold War Political Topography of the Middle East...*1138

³² Halperin, Sandra, *The Post-Cold War Political Topography of the Middle East...*1145

Contohnya saja industri minyak yang beroperasi di Saudi Arabia. hanya mempekerjakan sebagian kecil angkatan kerja di negara tersebut, sementara mayoritas masyarakat lokal di negara tersebut masih terlibat dalam kegiatan pertanian dan jasa. Aspek pertanian yang menyerap lebih dari 40% tenaga kerja pada tahun 1980 pun ternyata hanya mampu menyumbang 7.6% pendapatan negara.³³

Faktor lain yang menjadikan demokrasi sulit untuk berkembang di Timur Tengah adalah kuatnya pertumbuhan nilai – nilai konservatif yang berkaitan erat dengan nilai – nilai Islam yang dibuktikan dengan menjamurnya kelompok – kelompok Islam sayap kanan yang digunakan sebagai benteng perlawanan terhadap komunisme dan gerakan revolusi di Timur Tengah. Dominasi keberadaan Islam terbukti dengan dideklarasikannya Islam sebagai agama nasional negara – negara di Timur Tengah (kecuali Libanon). Pembentukan Islam sebagai agama nasional berkaitan erat dengan pengaruh pemilik tanah dan elit terkemuka yang memiliki kepentingan untuk melestarikan struktur sosial tradisional. Obsesi untuk melestarikan struktur sosial inilah yang pada akhirnya memicu gerakan radikalisme di Timur Tengah³⁴. Di Suriah dan Libanon radikalisme Islam muncul sejak tahun 1960an dan 1970an dan bertujuan untuk menentang reformasi dan kebijakan sosialis lainnya yang mengancam sistem pembagian lahan tradisional, sedangkan gerakan oposisi yang terdiri atas gerakan radikal Islam bangkit untuk menolak kebijakan liberalisasi ekonomi di Mesir dan Yordania³⁵.

Dengan adanya oposisi kelompok – kelompok radikal tersebut pemerintah pun tidak mampu melakukan reformasi ekonomi dan politik yang berarti. Kelompok radikalisme Islam ini semakin melebarkan perannya dalam perpolitikan Arab dengan masuk ke dalam dunia perpolitikan. Organisasi Persaudaraan Muslim (IM) merupakan pelopor dari gerakan ini. Didirikan oleh Hasan al – Banna pada tahun 1928 dan memulai kegiatan politiknya pada tahun 1936. Langkah pertama yang mereka ambil adalah melakukan perlawanan dengan kaum Zionis untuk membela rakyat Arab. Mereka juga menyusun serangan terhadap gereja

³³ Halperin, Sandra, *The Post-Cold War Political Topography of the Middle East...*1146

³⁴ Halperin, Sandra, *The Post-Cold War Political Topography of the Middle East...*1142

³⁵ Halperin, Sandra, *The Post-Cold War Political Topography of the Middle East...*1148

Katolik, Armenia dan gereja Ortodoks Yunani. Organisasi Persaudaraan Muslim melakukan mobilisasi dukungan bangsa Arab dan melakukan gelombang penolakan terhadap pemerintah yang berusaha mengubah struktur sosial tradisional masyarakat Arab. Gerakan ini pun mendapat dukungan penuh dari para pemilik tanah dan pemerintah Arab sejak tahun 1990an. Amerika Serikat dan para sekutunya menjadi sasaran utama organisasi tersebut. Amerika Serikat dianggap sebagai ancaman terbesar bangsa Arab karena membawa nilai – nilai yang bersebrangan dengan struktur sosial dan kepercayaan tradisional bangsa Arab yang selama ini dipertahankan³⁶.

Dari penjelasan di atas maka jelas bahwa prospek demokrasi di kawasan Timur Tengah masih sulit untuk berkembang. Para penguasa tradisional seperti tuan tanah dan gerakan ekstrimis Islam yang memiliki *power* besar dalam perpolitikan Arab merupakan faktor terbesar yang menghalangi demokrasi berkembang di kawasan ini. Akibat dari monopoli kekayaan ini Timur Tengah mengalami degradasi kualitas hidup yang signifikan, keadaan ini kemudian memunculkan ide – ide untuk melakukan demokratisasi dalam sistem perpolitikan negara – negara Arab. Menanggapi hal tersebut pemimpin elit politik di negara – negara Arab memiliki respon yang beragam untuk mempertahankan kekuasaannya.

Menurut Barry Rubin terdapat sejumlah respon yang dilakukan para elit politik, yakni *pertama* dengan memperkuat dan merevitalisasi ideologi nasionalis yang dicampur dengan nilai – nilai Islam atau menempatkan penekanan pada nilai – nilai Islam. Taktik ini dimaksudkan untuk merusak kedudukan oposisi Islam dan memperkuat daya tarik nasionalisme. Taktik ini banyak digunakan terutama di Suriah oleh Presiden Bashar Assad. Bashar merupakan pennatang utama dari adanya demokratisasi dan modernisasi, menurut Bashar kedua ideologi tersebut merupakan salah satu bentuk invasi sistematis yang merusak pikiran, jiwa dan identitas serta warisan bangsa Arab. Salah satu pengalaman sukses tentang perlawanan Islam terhadap demokratisasi adalah Perang Hizbullah – Israel pada tahun 2006. Perang ini dijadikan sebagai motivasi bagi para elit pemerintah untuk menantang demokratisasi di dunia Arab³⁷.

³⁶ Halperin, Sandra, *The Post-Cold War Political Topography of the Middle East...*1149-1150

³⁷ Barry Rubin, *How Arab Regimes Defeated The Livialization Challenge* dalam *Middle East Review of International Affairs...*91-92

Kedua adalah dengan melegitimasi oposisi demokrasi, seperti apa yang dilakukan oleh Saad Eddin Ibrahim, seorang ilmuwan sosial Arab yang meyakinkan masyarakat Mesir bahwa rezim pemerintah Arab merupakan “teman” mereka sedangkan para reformis modern merupakan musuh bagi Mesir dan dunia Arab. Bagi masyarakat yang mendukung perkembangan masyarakat sipil dan hak manusia di Mesir dianggap sebagai antek Barat yang mengancam pemerintahan Mesir.³⁸ *Ketiga* yaitu dengan melakukan represi mendiskreditkan pemberontak sebagai pengkhianat; dan *keempat* menjatuhkan hukuman kepada pemberontak, antara lain hukuman mati, dimasukkan dalam penjara, menyakiti keluarga mereka, menghilangkan hak mereka untuk bekerja, dilarang bepergian ke luar negeri, pengucilan, dan pengasingan. Keempat dengan memberikan peringatan bahwa demokratisasi hanya akan membawa ketidakstabilan, peringatan ini merupakan usaha untuk menanamkan rasa takut ke pada masyarakat Arab bahwa tindakan reformasi justru akan membawa ketidakstabilan keamanan nasional dan lebih buruk lagi akan ada penyerangan besar – besaran oleh kelompok Islamis. Taktik ini dilakukan untuk mengubah *mindset* rakyat yang awalnya pro demokrasi berubah haluan menjadi pro pemerintah. Terakhir dengan berpura – pura melakukan reformasi, para penguasa rezim pemerintahan telah mengklaim bahwa mereka telah memerintah secara demokratis misalnya dengan menyelenggarakan konferensi, retorika, pemilu tetap dan sebagainya³⁹.

Di samping itu, hambatan demokrasi di timur tengah ditengarai dua hal, pertama masalah ideology. Ideology kerap kali menjadi hambatan tersendiri bagi penegakan demokrasi. Bagi Islam militant, ingin penerapan Syariat Islam, sementara masyarakat yang mendukung pluralitas menghendaki kepemimpinan yang lebih demokratis. Kedua, sumber daya alam, yakni minyak yang terdapat di kawasan tersebut, di satu sisi merupakan suatu berkah namun disisi yang lain dapat berubah menjadi sebuah kutukan jika penguasa Negara tersebut menggunakan hasil minyak tersebut untuk melawan demonstrasi atau penyaluran ekspresi rakyat.⁴⁰

³⁸ Barry Rubin, *How Arab Regimes Defeated The Liberalization Challenge* dalam *Middle East Review of International Affairs...*93

³⁹ Barry Rubin, *How Arab Regimes Defeated The Liberalization Challenge* dalam *Middle East Review of International Affairs...*97-98

⁴⁰ <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/04/06/m21oco-inilah-tantangan-transformasi-demokrasi-timur-tengah>

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi masih sulit untuk dikembangkan dalam sistem pemerintahan negara – negara di Timur Tengah. Keadaan ini ditandai dengan sulitnya reformasi dalam struktur tradisional bangsa Arab yang terus dipertahankan oleh para elit politik dan grup – grup ekstrimis Islam yang berkembang pesat di kawasan Timur Tengah. Perkembangan grup ekstrimis ini banyak didukung oleh para elit politik yang ingin mempertahankan kekuasaannya dan menentang nilai – nilai demokrasi dan keterbukaan untuk berkembang di negaranya. Keadaan ini pada kenyataannya justru membawa banyak dampak negatif bagi masyarakat Timur Tengah, karena dengan solidnya kekuasaan para elit politik tersebut maka terjadi pendistribusian kekayaan dan hak asasi yang tidak merata. Ketimpangan sosial ini kemudian menjadikan Timur Tengah sebagai salah satu kawasan yang mengalami degradasi perkembangan terburuk di era modern saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Masykuri, *Demokrasi Di Persimpangan Makna* alih bahasa Wahib Wahab. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2004
- Klaff, Rene. *Prinsip-Prinsip Dasar Demorasi dan Pemerintahan Yang Baik dalam Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002
- Elposito, John. *a respon to the place of tolerance in Islam* (Originality Published in the Februari/Maret 2002 issues of Boston Review)
- Al-Jabiri, Syuro; *Tradisi, Partikularitas dan Universalitas*. Yogyakarta: LkiS, 2003
- El-Fadl, Abou. *Islam and The Callenge of demokrasi*. Princethon: Princethon University Press, 2004
- Vaezi, Ahmad. *Agama Politik Nalar Politik Islam* alih bahasa Ali Syahab. Jakarta: Citra, 2006
- Muhammad, Abū Nashr. *Menggugat Demokrasi dan Pemilu* alih bahasa Abu Muqbil Ahmad Yuswaji dan Abu Nizar Arif Mufid. Depok: Darul Hadits, 2004

- Ghofur, Abdul. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Madaniy, A. Malik. *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010
- El-Effendi, Abdelwahab. "Defisit Demokrasi di Dunia Islam" dalam Bernard Lewis *Islam Liberalisme Demokrasi* alih bahasa Mun'im A. Sirry. Jakarta: Paramadina, 2002
- Azra, Azyumardi. *Transformasi Politik Islam; Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Karni, Asrori S. *Hajatan Demokrasi: Potret Jurnalistik Pemilu Langsung Simpul Islam Indonesia Dari Moderat Hingga Garis Keras*. Jakarta: Era Media Informasi
- <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/16/07/27/oazb0v319-turki-indonesia-dan-demokrasi-2>
- Sandra, Halperin. *The Post-Cold War Political Topography of the Middle East: Prospects for Democracy*. tk: Third World Quarterly, 2005
- Rubin, Barry. *How Arab Regimes Defeated The Livialization Challenge* dalam *Middle East Review of International Affair*
- <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/04/06/m21oco-inilah-tantangan-transformasi-demokrasi-timur-tengah>